

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut seorang sosiolog Amerika sekaligus profesor di *Massachusetts Institute of Technology* bernama Sherry Turkle (Sherry Turkle, 2021), media sosial adalah sebuah platform yang memfasilitasi interaksi manusia dan memungkinkan penggunanya untuk berbagi ide, informasi, dan pesan pribadi satu sama lain. Globalisasi teknologi sangat berpengaruh dalam perkembangan media sosial, semakin maju perkembangan teknologi maka semua negara akan berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa negara mereka yang paling menguasai kemajuan teknologi.

Jika dilihat kembali perkembangan teknologi sendiri mulai berkembang pada abada ke-20 yang beriringan dengan evolusi media sosial. Setelah superkomputer yang diciptakan oleh para ilmuwan pada tahun 1940-an mengarah kepada jaringan antar komputer yang kemudian hasilnya mengarah kepada pengembangan kelahiran internet dan *World Wide Web*. Faktanya salah satu media sosial pertama di dunia adalah *Six Degrees* yang diciptakan pada tahun 1997 yang menciptakan fasilitas pengguna dapat membuat profil pribadi dan terhubung dengan pengguna lain. Setelah disusul dengan perkembangan media sosial, Friendster merupakan salah satu media sosial pertama di Asia tenggara yang mendapatkan banyak peminat dari pengguna Friendster ini (Christy, 2023)

Media sosial merupakan salah satu bentuk dari globalisasi teknologi, namun ada beberapa negara yang menganggap media sosial adalah ancaman dalam bentuk teknologi keamanan seperti yang dialami oleh Amerika Serikat dan China. Penulis disini mengambil fokus mengenai kebijakan Amerika Serikat dan China dalam melindungi negara dari potensi ancaman teknologi media sosial, pengaruh ancaman teknologi bagi Amerika Serikat dan China, strategi marketing AS dan China dalam mempromosikan media sosial milik negaranya, selain itu juga dampak bagi Amerika Serikat dan China dari pembatasan Penggunaan Twitter dan TikTok.

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang melahirkan banyak perusahaan teknologi terkenal seperti Apple, Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft, Google dan juga Tesla. Amerika Serikat terus berinovasi dalam bidang teknologi, selain menguntungkan sumber daya manusia di Amerika Serikat hal ini tentunya juga menguntungkan bagi perekonomian negara karena teknologi yang diciptakan oleh perusahaan yang berdiri di AS saking digemarinya mereka berhasil untuk membuka cabang perusahaannya di negara lain seperti Perusahaan Google dan Aplikasi X (Twitter) yang membuka cabang perusahaan di Indonesia. Amerika Serikat memiliki perputaran inovasi teknologi yang pesat sehingga hal ini membuat orang-orang akhirnya penasaran dengan inovasi teknologi terbarunya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat karena dengan mereka menciptakan inovasi teknologi maka akan banyak negara-negara lain yang berdatangan ke AS untuk bekerjasama.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada pemblokiran media sosial Aplikasi X (Twitter) dan TikTok, di Amerika Serikat sendiri penggunaan Aplikasi X (Twitter) sangatlah digemari. Pemblokiran pada media sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, platform media sosial, atau entitas lainnya untuk membatasi atau menghentikan akses pengguna terhadap platform atau konten tertentu di dalam platform tersebut. Jenis pemblokiran yang dilakukan terhadap Twitter dan TikTok adalah jenis pemblokiran total, yaitu pembatasan ataupun penghentian seluruh akses media sosial di wilayah tertentu. Pemblokiran pada media sosial mengacu pada upaya untuk menghentikan atau membatasi akses ke platform media sosial tertentu atau konten yang ada di dalamnya. Tindakan ini bisa diambil oleh pemerintah, perusahaan teknologi, atau otoritas lainnya dengan berbagai alasan. Misalnya, beberapa negara memberlakukan pemblokiran media sosial untuk mencegah penyebaran disinformasi atau propaganda yang dapat mengganggu keamanan nasional dan ketertiban umum. Pada saat krisis atau konflik, pemblokiran bisa digunakan untuk menghentikan penyebaran berita yang dianggap berpotensi menghasut atau membangkitkan ketegangan lebih lanjut. Seperti yang terjadi pada AS yang memblokir TikTok karena berfokus pada keamanan nasional

menjaga privasi data masyarakatnya, begitupun dengan China yang memblokir Twitter yang berfokus pada masalah menjaga stabilitas sosial dan politik dan mengendalikan informasi yang beredar di wilayahnya.

Adapun alasan yang mendasari mengapa penulis mengambil TikTok dan Aplikasi X (Twitter) sebagai objek media sosial dalam media sosial. China memiliki beberapa media sosial lokal yang sedang dalam pertimbangan diblokir oleh AS seperti WeChat, Weibo, Alipay, dan TikTok namun penulis memilih untuk melakukan penelitian terhadap media sosial TikTok. Karena menurut data dari databoks tahun 2023 (Databoks, 2023) AS adalah negara teratas yang banyak menggunakan media sosial TikTok. Selain itu ada pertimbangan lain yang membuat penulis memilih TikTok sebagai objek penelitannya yaitu karena kasus pemblokiran TikTok ini yang paling sering dibahas oleh media dan sering dipermasalahkan oleh pemerintah AS terutama Donald Trump dan Joe Biden, dari kasus pemblokiran TikTok ini kita dapat melihat bagaimana dampaknya terhadap hubungan AS dan China.



**Gambar 1. 1 Data negara dengan jumlah pengguna TikTok Terbanyak di dunia**

**Sumber: Databoks (2023)**

Mengutip data yang dikeluarkan oleh artikel Universitas Airlangga (Universitas Airlangga, 2024), jumlah total pengguna TikTok di AS ada sekitar 170 juta atau sebesar 51 % dari total penduduk AS 331,9 juta. Dengan banyaknya penggunaan TikTok di AS maka keuntungan yang diperoleh TikTok di AS pada tahun 2023 sangat besar sekitar 16 miliar US\$ (251,3

Triliun), pendapatan TikTok yang sangat besar ini menjadi dorongan bagi pemerintah AS agar dapat melakukan negoisasi terhadap pihak ByteDance untuk menjual sahamnya 20 % kepada Oracle dan Walmart jika TikTok tetap ingin beroperasi di AS.

Selain TikTok ada objek lain yang diambil oleh penulis yaitu Aplikasi X (Twitter), Aplikasi X (Twitter) merupakan salah satu media sosial barat diblokir oleh China pada tahun 2009 berbarengan dengan media sosial barat lainnya seperti Facebook dan Youtube. Alasan mengapa penulis lebih memilih menjadikan Twitter sebagai objek penelitian karena menurut data yang ditampilkan oleh databoks (Databoks, 2023) pada tahun 2023 pengguna Twitter diseluruh dunia berjumlah 372,9 juta, banyaknya pengguna Aplikasi X (Twitter) membuktikan bahwa media sosial Twitter memiliki dampak yang cukup kuat sehingga hal ini membuat penulis ingin mencari tahu lebih dalam mengenai pemblokiran Twitter ini apakah ada kepentingan politik tersendiri yang diambil oleh pemerintah China atau hanya ingin melindungi industri media dalam negeri.



**Gambar 1. 1 Data negara dengan jumlah pengguna Twitter terbanyak di dunia**

**Sumber: Databoks (2023)**

Selain untuk membagikan konten para pengguna Aplikasi X (Twitter) di Amerika Serikat juga menggunakannya untuk berbagi pikiran dan juga membagikan pemikiran masyarakat Amerika Serikat. Tidak jarang Aplikasi X (Twitter) juga digunakan oleh aktivis, politisi, dan juga public figure Amerika

Serikat. Seperti contohnya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sering membagikan pemikirannya lewat Aplikasi X (Twitter) atau yang bisa disebut “Tweets” hal ini membuktikan bahwa Aplikasi X (Twitter) digemari oleh seluruh kalangan masyarakat di Amerika Serikat. tidak jarang juga Aplikasi X (Twitter) dijadikan tempat aksi protes oleh masyarakat Amerika Serikat tentang suatu peristiwa atau kebijakan, melalui penggunaan hastag di Aplikasi X (Twitter) maka semua hal akan cepat menjadi trend perhatian dunia.

Pada tahun 2023 pengguna Aplikasi X (Twitter) diseluruh dunia berjumlah 372,9 juta dengan penghasilan perusahaan X corp sebesar 5,8 M US\$ atau setara dengan 91 miliar rupiah. Dengan banyaknya penghasilan yang dihasilkan Perusahaan X corp maka negara AS pun mendapatkan keuntungan dari kehadiran Aplikasi X (Twitter), salah satu pendapatan yang diterima pemerintah AS dari perusahaan X corp adalah pajak penghasilan dan pajak karyawan. Pemblokiran Twitter di China dapat merugikan pendapatan AS yang berasal dari Perusahaan X corp karena perusahaan tersebut jika membuka cabang di negara China maka akan menguntungkan baik untuk china, AS, dan Perusahaan X Corp dengan adanya hukum pajak internasional. Dengan total penduduk China sebesar 1,4097 miliar tentu pendapatan Perusahaan X Corp di China akan meningkat melalui iklan maupun saham X corp di China. Dengan adanya pemblokiran Twitter berdampak dari segi perekonomian AS, China dan Perusahaan X Corp.

Twitter merupakan sebuah platform media sosial yang didirikan oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, dan Evan Williams pada tahun 2006 tepatnya pada tanggal 21 Maret Di San Francisco, Amerika Serikat. Pada saat itu Twitter pertama kali dikenalkan oleh Jack Dorsey di sebuah acara yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan podcast yang bernama Odeo. Faktanya Twitter pertama kali digunakan untuk layanan internal bagi para karyawan di Odeo. Lalu di tahun 2007 baru lah muncul Perusahaan Twitter dengan nama Twitter Inc. Pada awalnya konsep Twitter hanya untuk mengirimkan pesan yang dapat dibaca semua orang, namun setelah terus berinovasi Twitter akhirnya berhasil menjadi media sosial dengan fitur dapat mengunggah pesan singkat. Lalu pada tahun 2023 bulan Juli Twitter resmi mengganti namanya

menjadi X setelah Perusahaan Twitter dibeli oleh Elon Musk pada Oktober 2022, Elon Musk membeli Perusahaan Twitter seharga US\$44 miliar atau setara dengan Rp 683 triliun (Ilmiah, 2021)

Kemunculan Aplikasi X (Twitter) disambut baik oleh semua orang namun ada beberapa negara yang khawatir dengan kehadiran Twitter seperti negara China. Negara China sudah resmi memblokir Twitter pada tahun 2009, hal tersebut dikarenakan pada saat itu pembahasan tentang demo Tiananmen Square ramai dibahas di Twitter. Peristiwa Tiananmen Square adalah peristiwa demo yang terjadi di Lapangan Tiananmen Beijing, Tiongkok pada tahun 1980-an yang disebabkan oleh keinginan rakyat China agar pemerintahannya tidak membatasi kebebasan pers dan pada saat itu juga China sedang mengalami krisis ekonomi. Dalam peristiwa ini kurang lebih ada sepuluh ribu korban meninggal dan juga ditangkap akibat pembantaian Tiananmen. Banyaknya opini masyarakat China mengenai peristiwa Tiananmen membuat pemerintah China takut dengan kehadiran Aplikasi X (Twitter) karena pemerintah China tidak bisa mengendalikan opini yang dituliskan oleh masyarakat China di Aplikasi X (Twitter), sehingga pada tahun 2009 di era pemerintahan Hu Jintao Aplikasi X (Twitter) resmi diblokir dari China. Hal ini yang akhirnya menjadi titik tolak pemerintah China mengeluarkan kebijakan untuk memblokir seluruh media sosial AS pada tahun 2009, dengan tujuan mengendalikan stabilitas sosial dan politik di China dan agar masyarakat China tidak mendapat pengaruh asing media sosial AS yang bersifat terbuka dan meluas. Namun tidak sepenuhnya Twitter diblokir di China karena pada kenyataannya beberapa pemerintah China dan media resmi China masih menggunakan Twitter dengan tujuan menyebarkan informasi, kebijakan dan berinteraksi dengan pejabat dari negara lainnya. Pejabat dan media China yang diizinkan memakai Twitter antara lain: Zhao Lijian juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying Juru bicara lain dari Kementerian Luar Negeri China, *China Xinhua News* agensi berita resmi China yang sering membagikan berita dan pernyataan resmi, *China Daily* sebuah surat kabar berbahasa Inggris yang dimiliki oleh pemerintah China, *Global Times media* yang dikelola oleh *People's Daily*, yang sering kali menyuarakan pandangan

resmi pemerintah China, *Chinese Embassy in the US* Akun resmi Kedutaan Besar China di Amerika Serikat, Liu Xiaoming Mantan Duta Besar China untuk Inggris.(BBC News, 2019)

Diketahui pada tahun 2023 ada 83% kepala negara memiliki akun Twitter, hal ini menunjukkan bahwa negara-negara lain menganggap Twitter ada media sosial yang efektif dan efisien untuk melakukan diplomasi digital. Dalam hal ini menyebabkan China tidak bisa memblokir akses Twitter sepenuhnya, pihak pemerintah China tetap memakai Twitter sebagai bentuk pelaksanaan diplomasi digital. Fenomena ini disebut *Twiplomacy* (*Twitter Diplomacy*). *Twitter diplomacy* adalah istilah penggunaan Twitter oleh pemerintah untuk melakukan diplomasi dengan negara lain, menyuarkan isu, menyampaikan kebijakan, dan menyebarkan informasi. Alasan mengapa Twitter menjadi media sosial favorit untuk melaksanakan diplomasi digital adalah Twitter menyediakan fasilitas untuk berbagai jenis interaksi yang digunakan untuk berbagai tujuan secara *real time*. Twitter menyediakan ruang untuk berdebat, gosip, humor, dan lainnya secara terbuka dan meluas. Keterbukaan dalam interaksi tersebut memungkinkan para pejabat untuk melaksanakan diplomasi digital. Contohnya pada saat COVID-19 Donald Trump sering membagikan pemikirannya tentang kritik penanganan awal COVID-19 awal di China, lalu Joe Biden yang pernah memposting *Tweet* kritik terhadap perusahaan teknologi China seperti TikTok yang mengancam keamanan data. Lalu pemerintah China juga ada memposting *Tweet* yang menyindir pemerintah AS seperti Hua Chunying juru bicara Kementerian Luar Negeri China memposting *Tweet* menyuarkan isu George Floyd di AS sebagai pelanggaran hak asasi manusia sedangkan AS sendiri sering mengkritik China atas pelanggaran hak asasi manusia (Brian Hocking, 2022)

Selain negara Amerika Serikat ada juga negara yang berinovasi dalam bidang teknologi media sosial yaitu China. Salah satu aplikasi media sosial yang sangat digemari oleh China dan seluruh dunia adalah TikTok. TikTok adalah sebuah platform dari china yang dulunya dikenal nama Musical.ly singkatnya kemunculan TikTok pertama kali pada tahun 2016 yang merupakan produk unggulan dari ByteDance namun pada tahun 2018 Perusahaan Bytedance

karena sudah pernah membeli Musical.ly di tahun 2016 maka Musical.ly dan Tiktok akhirnya digabungkan (Rizki Setyo Nugroho, 2023)

TikTok di China disebut juga dengan Douyin, media sosial TikTok menawarkan berbagai fitur mereka seperti membagikan konten berupa video berdurasi pendek, mendapatkan informasi terkini, dan melakukan parodi. Perkembangan TikTok sangatlah pesat siapa yang menyangka media sosial yang awalnya bertempat di Beijing namun sekarang TikTok sudah menjelajah ke seluruh dunia. Penggunaan TikTok juga sangat beragam dari remaja, politisi, public figure bahkan tidak jarang perusahaan memiliki akun Tiktok untuk mempromosikan produk mereka. TikTok tidak hanya dapat digunakan untuk bersenang-senang tetapi TikTok juga dapat digunakan sebagai strategi marketing. Karena pengguna TikTok yang sangat banyak dan mendunia tidak jarang sebuah perusahaan melakukan promosi di TikTok, hal tersebut tentu sangat menguntungkan dengan membuat konten video menarik berdurasi kurang lebih 10 menit dengan mengikuti trend yang sering melewati FYP (For Your Page). Namun walaupun Tiktok ini sangat digemari oleh masyarakat China tetapi pengawasan konten-konten TikTok oleh pemerintah China sangatlah ketat, konten-konten Tiktok juga berfungsi sama seperti Aplikasi X untuk memberikan opini terhadap suatu fenomena tetapi sayangnya karena China menganut sistem pemerintah demokrasi komunis maka kebebasan masyarakat China dalam beropini sangat terbatas. Jika kita mengingat kembali mengenai pengertian demokrasi komunis yaitu sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan tentang kesetaraan kesejahteraan dan kemakmuran dengan cara semua aset yang ada di China seperti tanah, tenaga kerja, dan modal perusahaan adalah milik negara (Monica Ayu Caesar Isabela, 2022)

Salah satu upaya pemerintah China membatasi informasi dari luar yang kurang bisa mereka kendalikan adalah dengan mem-blokir media sosial barat, namun dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah media sosial barat Twitter atau Aplikasi X. Twitter atau Aplikasi X sendiri merupakan produk dari Amerika Serikat sehingga dilarang keras oleh pemerintah China untuk digunakan di wilayahnya. Namun seperti yang kita ketahui hubungan AS-China ini sering sekali memanas, kedua negara ini walaupun saling mengakui

pentingnya keberadaan negara lawan di wilayah regional namun mereka kesulitan untuk menemukan titik keseimbangan hubungan politik luar negeri antara AS-China. Memanasnya hubungan kedua negara disebabkan oleh kepentingan politik dari masing-masing negara, kedua negara menganggap bahwa hubungan AS-China adalah sebuah persaingan bahkan dalam pidato yang disampaikan oleh Joe Biden pada tahun 2022 di depan majelis umum PBB ia mengatakan bahwa hubungan AS-China adalah sebuah persaingan tetapi kami tidak ingin mencari konflik. Hal itu bisa membuktikan mengapa China memblokir Aplikasi X begitupun AS yang memblokir Tiktok. Kedua negara ini sama-sama tidak ingin masyarakatnya banyak menggunakan produk negara lawan sehingga mereka mengeluarkan kebijakan untuk saling memblokir media sosial dari negara lawan, hal ini dianggap oleh pemerintah AS-China kebijakan untuk melindungi potensi gangguan dari luar yang bersifat *cyber* (bagir Manan, 2012)

Pada bulan agustus 2020 Donald Trump mengeluarkan perintah melarang Tiktok beroperasi di AS, Trump melarang keberadaan TikTok di negaranya karena Trump merasa takut keamanan nasional AS akan terganggu jika mereka memberikan izin TikTok tetap beroperasi. Mendengar tuduhan tersebut pihak TikTok berusaha menyakinkan AS bahwa keberadaan mereka disana bukan sebagai mata-mata China dan juga pihak TikTok mengatakan bahwa mereka akan menjaga data warga AS yang menggunakan TikTok sehingga data warga AS tidak ada bocor atau salah dipergunakan. Perusahaan ByteDance melihat masalah ini berpendapat bahwa mereka tidak akan memberikan teknologi atau algoritma ke perusahaan AS. Sudah beberapa kali dari pihak AS menyatakan bahwa TikTok menjadi ancaman keamanan nasional dikarenakan data masyarakat AS yang menggunakan TikTok dapat diakses dari beijing dan pihak TikTok terus membantah akan hal tersebut. Karena keadaan yang terus memanas AS yang terus mendesak ByteDance untuk segera menghentikan pemakaian TikTok sehingga membuat TikTok geram dan melaporkan pemerintahan Trump ke pengadilan tinggi agar pemerintah Trump lebih berhati-hati lagi dalam mengambil kebijakannya terhadap TikTok. TikTok menegaskan bahwa perusahaannya adalah

perusahaan yang transparan tentang data yang mereka simpan dan tidak mereka simpan, selain itu juga TikTok mengatakan bahwa mereka selalu menempatkan keamanan pengguna menjadi prioritas nomor satu (Irma Indrayani, 2022)

Perusahaan cabang yang ada di Beijing tetap bersikeras tidak akan hilang kendali atas aplikasi TikTok. TikTok menjadi sebuah media perwujudan bagi masyarakat Amerika untuk berekspresi bebas dan berkomentar apapun di ruang publik terutama bagi generasi kaum muda yang memiliki tingkat kreativitas tinggi dan besarnya jiwa ingin tahu terhadap suatu hal. Namun kemunculan media sosial ini dalam memberikan kemudahan dalam *freedom of speech* dikhawatirkan dapat menjerumuskan individu lainnya untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara atau pemilu. Mendapatkan informasi yang tidak valid, hingga memberontak kepada pemerintah. Kejadian kegagalan kampanye Trump menjadi salah satu gambaran besar pengaruh dari media sosial, lalu gerakan #BlackLivesMatter yang pernah menggemparkan isunya hingga satu dunia memfokuskan pada masalah rasisme di AS dianggap sebagai negara pencetus HAM. Penyebaran informasi yang sangat cepat karena adanya networking memberikan dampak yang sangat signifikan.

Ada asumsi yang mengatakan bahwa AS ini mengakuisisi perusahaan TikTok hingga ingin membeli Perusahaan TikTok. Hal tersebut tak hanya sekedar kekhawatiran dengan keamanan data masyarakat Amerika, namun adanya asumsi pribadi Trump pada saat masa kampanye pemilihan presiden di tahun 2020 tersebut. Warga Amerika membeli tiket tersebut secara online namun tak menghadiri acara kampanye tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat video TikTok yang menyuarakan untuk tidak datang ke acara kampanye Trump. secara teknis ByteDance memiliki kontrol penuh terhadap algoritma video TikTok yang direkomendasikan terhadap pengguna aplikasi ini. Yang dikhawatirkan adalah viralnya video yang menghasut masyarakat AS agar tidak perlu hadir dalam kampanye Trump menyebar ke seluruh dunia dan membuat citra Amerika buruk di mata dunia yang dimana seharusnya kampanye menjadi ajang para politisi untuk menaikkan citra dan martabat negaranya di mata dunia. Tentu hal tersebut membuat Trump geram akan kehadiran TikTok sehingga ia berusaha melakukan apa saja agar TikTok tidak

bisa beroperasi di AS. Trump selalu mempermasalahkan kehadiran TikTok dengan berbagai macam alasan agar Perusahaan ByteDance mundur karena takut dengan berbagai ancaman yang dikeluarkan Trump namun sayangnya ByteDance tidak mundur karena ancaman AS.

Alasan lain kenapa AS ingin menguasai Perusahaan ByteDance karena adanya permasalahan geopolitik, perbedaan nilai politik, hingga persaingan di wilayah regional serta global antara AS dan China. Kemudian permasalahan tarif dalam perang dagang yang terjadi di antara kedua negara ini karena banyaknya ketidaksepakatan yang pada akhirnya merambat ke dunia teknologi TikTok sendiri akhirnya mendapatkan ancaman banned oleh Amerika Serikat dengan alasan masalah keamanan data pengguna TikTok masyarakat Amerika yang ditangani oleh induk Perusahaan TikTok yaitu ByteDance yang berada di china. Permasalahan tersebut naik dengan adanya *Speech act* yang dilakukan oleh departemen perdagangan AS. Presiden Trump hingga sekretaris negara menyatakan bahwa jika TikTok akan mengancam keamanan nasional, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri AS. Namun TikTok membantah tuduhan tersebut karena tidak adanya bukti jika data yang dimiliki oleh ByteDance diberikan ke pemerintah China.

Kontroversi mengenai TikTok di AS diasumsikan sebagai salah satu aplikasi yang mana perusahaannya menjadi tangan kanan dari pemerintah Tiongkok sehingga meningkatkan kecurigaan bagi AS apabila perusahaan mengirimkan data pribadi pengguna ke pemerintah sehingga membahayakan privasi pengguna di negara tempat aplikasi tersebut digunakan. Namun TikTok selalu membantah atas tuduhan tersebut dan mengatakan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan Tiongkok. Dapat dilihat dari India menjadi negara yang telah melarang warga negaranya untuk menggunakan TikTok. Beberapa petinggi, politikus, dan lain sebagainya selain presiden AS, Donald Trump menyampaikan kekhawatiran TikTok yang semakin populer digunakan. Kasus yang cukup unik dimana perusahaan disini bukan menjadi aktor utama yang perlu dihadapi oleh ByteDance untuk bersaing dan melakukan ekspansi, namun pemerintah AS. Dikutip dari CNN Business, petinggi seperti pemimpin minoritas Senator Chuck Schumer dan Senator

Republik Arkansas Tom Cotton menghimbau komunitas intelijen untuk mengukur dan menilai risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang diakibatkan oleh meluasnya TikTok di AS terhadap keamanan nasional. Namun seluruh pernyataan dan tuduhan tersebut dianggap sebagai tuduhan tidak berdasarkan fakta. Dengan adanya pelarangan TikTok di AS dan dianggap sebagai ancaman nyata, terdapat beberapa cabang militer AS dan lembaga termasuk Administrasi Keamanan Transportasi dan Angkatan Darat AS telah melarang personel mereka untuk menggunakan TikTok. Tindakan pemblokiran ini menjadi sebuah langkah yang dapat melanggar aturan karena menghalangi pengguna TikTok di AS dalam kebebasan berpendapat atau right of speech karena media TikTok dinilai sangat ampuh. Tidak hanya itu, Tiongkok sendiri dicap tidak etis dan perencanaan industrinya dipimpin oleh pemerintah yang menegakkan transfer teknologi.

Tuduhan lainnya adalah Tiongkok telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung rezim otoriternya dan bahwa kemajuan Tiongkok dalam sains dan teknologi akan merugikan kepentingan nasional dan ketertiban regional AS. Tindakan pencurian data dan kontrol teknologi yang diasumsikan dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok dapat dikatakan merupakan pelanggaran aturan akan privasi negara. Tidak hanya itu, TikTok menilai Perintah Eksklusif yang dikeluarkan Administrasi dibawah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tidak mengikuti proses hukum dan gagal memberikan bukti nyata bahwa TikTok merupakan ancaman nyata atau membenaran atas tindakan hukumannya yang menuduh TikTok sebagai ancaman keamanan nasional. Pernyataan dan tindakan akan memblokir Tiktok ini juga telah melanggar perlindungan proses hukum Amandemen Kelima. TikTok pun mengeluarkan respon mereka pada tanggal 24 Agustus 2020.

Mereka menyatakan sangat tidak setuju akan tuduhan tersebut yang dapat mencabut hak-hak komunitas. Mereka membantah tuduhan tersebut bahwa TikTok merupakan ancaman keamanan nasional dan menyatakan keberatan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin kepercayaan pengguna AS dengan mengambil tindakan luar biasa yang telah diketahui oleh pemerintah AS yakni penyimpanan data

disimpan di luar Tiongkok (di Amerika Serikat dan Singapura) dan membangun penghalang perangkat lunak yang membantu TikTok menyimpan data secara terpisah dari data pengguna produk ByteDance lainnya demi menjamin dalam perlindungan privasi dan keamanan pengguna TikTok AS, Tidak hanya itu, personil utama yang bertanggung jawab untuk melayani pasar TikTok termasuk CEO, Kepala Keamanan Global, dan Penasihat Umum, keseluruhannya adalah orang Amerika yang berbasis di AS dan tidak tunduk kepada hukum Tiongkok. Moderasi konten AS pun dipimpin oleh perusahaan yang berbasis di AS, tim beroperasi secara independen dan server pun terpisah dari Tiongkok yang mana berlokasi di AS dan Singapura.

Bukan hanya media sosial tetapi media pers juga berada dibawah kekuasaan China yang artinya pemberitaan yang dikeluarkan oleh media pers pun tidak boleh melewati batas sampai menghasut masyarakat China, untuk membatasi informasi yang beredar China bukan hanya sekedar omongan ancaman dari pemerintah China tetapi China memiliki yang namanya undang-undang keamanan nasional dan diberlakukan di Hong kong. Dampak dari pembatasan informasi di media sosial dan media pers ini membuat akhirnya China mendapatkan posisi nomor satu sebagai negara dengan tingkat kebebasan berinternet terendah di dunia pada tahun 2021 diambil dari data databooks (Monavia Ayu Rizaty, 2022) Ketegangan antara AS dan China semakin memanas pada tahun 2022 setelah diketahui bahwa ada empat karyawan TikTok mengakses data pribadi akun TikTok jurnalis AS. Jurnalis tersebut adalah Cristina Criddle dari Financial Times dan juga ada seorang reporter dari BuzzFeed, ke empat karyawan TikTok itu langsung dipecat oleh CEO TikTok Shou Zi Chew karena menurutnya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya tidak sesuai dengan prinsip yang dijalankan oleh perusahaan. Melihat hal ini CEO ByteDance Rubo Liang tidak diam, beliau menyatakan bahwa tidak peduli apa penyebab atau hasilnya jika karyawan melakukan penyelidikan yang salah arah secara serius berarti melanggar kode etik perusahaan (CNN Indonesia, 2022)

Permasalahan antara AS dan China pada pemblokiran TikTok terus berlanjut sampai masa kepemimpinan Donald Trump habis. Pada era

kepemimpinannya trump berhasil meyakinkan partai-partai politik di AS bahwa kehadiran TikTok bisa menjadi serangan dari China, partai-partai politik di AS mendukung pemblokiran TikTok dengan alasan kebijakan luar negeri China yang bersifat kontroversial sehingga kebijakannya tidak dapat dipercaya. Setelah berakhirnya pemerintahan era Donald Trump lalu pada era Joe Biden tetap melanjutkan kebijakan pemblokiran TikTok, kebijakan dari pemblokiran TikTok pada masa kepemimpinan Biden ini memiliki tujuan yang sama dengan Trump yaitu melindungi AS dari potensi ancaman keamanan nasional dan menganggap bahwa TikTok memiliki peran yang besar untuk mengambil data-data masyarakat AS sekaligus dapat menjadi mata-mata dari China untuk melihat pergerakan AS (Swanda, 2023)

Sampai saat ini fenomena pemblokiran TikTok yang terjadi di AS masih berlanjut, bahkan pada Maret 2023 CEO TikTok Shou Zi Chew menghadiri sidang kongres untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan yang di lemparkan AS terhadap TikTok sekaligus untuk membuktikan bahwa TikTok memprioritaskan privasi pengguna dan bukan mata-mata dari China.

Pemblokiran baru resmi terjadi pada masa kepemimpinan Joe Biden, contohnya ada pada negara bagian AS Montana berdasarkan keputusan hakim federal yang menyatakan bahwa kehadiran TikTok dapat melanggar privasi pengguna dan juga berpotensi mengancam keamanan nasional AS. Montana adalah negara bagian AS yang pertama kali melakukan pemblokiran terhadap TikTok secara total, kebijakan ini akan resmi dijalankan pada tanggal 1 Januari 2024 (CNBC Indonesia, 2023)

Relasi antara pemblokiran Twitter dan TikTok dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika persaingan strategis yang lebih luas antara kedua negara. Tindakan ini mencerminkan pendekatan saling balas yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori realisme dalam hubungan internasional, dimana negara-negara berusaha melindungi kepentingan nasional mereka di tengah sistem internasional yang anarkis. Relasi waktu dari kedua tindakan pemblokiran ini memperlihatkan pola aksi dan reaksi antara dua negara yang saling bersaing untuk mempertahankan posisi mereka di mata dunia. Pemblokiran Twitter oleh China dan TikTok oleh AS memperlihatkan bagaimana kedua negara saling

memandang sebagai ancaman yang berpotensi, terutama dalam hal pengaruh teknologi dan informasi. upaya pemblokiran ini mencerminkan ketidakpercayaan yang sangat mendalam dan keinginan untuk melindungi kepentingan masing-masing negara dalam menghadapi ancaman nyata atau yang dirasakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Hubungan Amerika Serikat dan China menghadapi banyak sekali tantangan dalam menyeimbangkan politik luar negeri mereka, salah satu yang mereka hadapi pada saat ini (2018-2023) adalah penggunaan teknologi yang dianggap sebagai ancaman dalam bentuk *cyber*. Hubungan bilateral Amerika Serikat dan China beberapa sempat menghadapi ketegangan apalagi pada saat AS berada di era kepemimpinan Donald Trump, pada saat itu Trump mengeluarkan perintah eksekutif kepada perusahaan Bytedance untuk segera menjual perusahaan mereka ke AS jika Tiktok tetap ingin beroperasi di AS. Ketegangan hubungan Amerika Serikat dan China mendapat perhatian dari seluruh dunia baik dari politisi maupun masyarakat sipil, kedua negara tersebut saling bersaing untuk mendapatkan peran sebagai negara terkuat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa dapat terjadi pemblokiran Aplikasi X (Twitter) di China dan TikTok di AS pemblokiran?
2. Bagaimana dampak dari pemblokiran Aplikasi X (Twitter) di China dan TikTok di AS pemblokiran?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat perbedaan sudut pandang kepentingan Amerika Serikat dan China dalam pemblokiran media sosial sehingga terjadi rivalitas dalam konteks teknologi.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Kegunaan ilmiah yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang hubungan bilateral Amerika Serikat dan China yang dalam hal teknologi media sosial yang dianggap mengancam keamanan nasional negara mereka sehingga terjadi pembatasan penggunaan media sosial Tiktok dan Twitter.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dan manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat dijadikan referensi dalam penelitian berkelanjutan kedepannya mengenai penggunaan media sosial yang berdampak pada negara.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian yang berisi kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan penelitian terdahulu (literature review) yang berisi justifikasi penelitian yang berisi alasan penelitian terdahulu ini relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian penulis dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, kerangka teori berisi teori dan konsep, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan pendekatan penelitian, teknik pengambilan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, aspek, dimensi, dan parameter.

#### **BAB IV: KEBIJAKAN PADA PEMBLOKIRAN TIKTOK DAN TWITTER**

Bab ini berisikan mengenai pembahasan kebijakan-kebijakan yang mengatur masalah pemblokiran Twitter dan TikTok dan membantu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu pemblokiran TikTok dan Twitter yang mengancam keamanan nasional dan keamanan siber.

#### **BAB V: HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN CHINA**

Bab ini berisikan mengenai pembahasan dampak pemblokiran Twitter dan TikTok terhadap hubungan AS dan China.

#### **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai pernyataan hasil dari keseluruhan dan analisis penelitian ini yang berupa kesimpulan.

